

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 991993
Nama Pemda : Kab. Kapuas Hulu
Verifikator :

A. Target Makro

Uraian	Nilai Target	Nilai Input	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	5,56% 6,43%	4,85	-
Tingkat Kemiskinan	6,61% 7,11%	7,00	-

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	-
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	-
Ketahanan Pangan (Perikanan)	-
Ketahanan Pangan (Pertanian)	-
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	-
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	-

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	KUA (2026)	Persen KUA	Keterangan
Mandatory Spending			
PDRD			

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	- Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; - Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan dukungan belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; - Penguatan kawasan sentra produksi komoditas andalan (sawit, karet, kelapa, hasil laut dan perikanan); - Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang efektif menaikkan nilai tambah produk; - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - Dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi market produk dan sertifikasi yang memadai; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	none	Akselerasi investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan volume penanaman modal dengan strategi peningkatan kompleksitas ekonomi melalui investasi hilirisasi industri dan pemanfaatan teknologi, dengan target sebesar 5,20% sampai dengan 6,20%. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi yang akan dialokasikan pada program: - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; - Program Promosi Penanaman Modal; - Program Pelayanan Penanaman Modal; - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan meningkatkan alokasi untuk pemenuhan Belanja sinergi Opsen PKB dari Jumlah Target Pendapatan Bagi Hasil PKB/Opsen Pajak Kendaraan	-

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, persalinan, dan imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.	none	Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembangunan di sektor kesehatan akan mengalokasikan Transfer Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik, pemerataan layanan kesehatan, dan peningkatan gizi masyarakat, serta peningkatan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2026 dialokasikan melalui program: a. Program yang mendukung target penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas Hulu, yang di jabarkan kedalam kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah pengampu yang akan mengimplementasikan strategi kebijakan tersebut. b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga kan berusaha meningkatkan persentase alokasi Pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan minimal dengan penambahan 0,3%	-
Ketahanan (Perikanan)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;	none	Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu, strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas perikanan dengan target diatas kenaikan rata-rata nasional, dengan dukungan program sebagai berikut: a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya b. Program yang mendukung target penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas Hulu, yang di jabarkan kedalam kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah pengampu yang akan mengimplementasikan strategi kebijakan tersebut ke dalam alokasi sub kegiatan	-

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Penguatan kerja sama antar daerah.	none	Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu, strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan dengan target diatas kenaikan rata-rata nasional, dengan dukungan program sebagai berikut: a. Program Penyuluhan Pertanian b. Program yang mendukung target penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas Hulu, yang di jabarkan kedalam kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah pengampu yang akan mengimplementasikan strategi kebijakan tersebut ke dalam alokasi sub kegiatan	-
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah; • Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM dengan target 2026 sebesar 4,75% sampai dengan 5,75% untuk penurunan tingkat kemiskinan. Pembangunan di Desa akan difokuskan pada peningkatan Status desa dari desa tertinggal menjadi Desa Mandiri minimal sebanyak 9 desa di Tahun 2026, dan percepatan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, selain itu Dukungan Pemerintah Daerah berupa: a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program Kawasan Permukiman; c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh; d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU); e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat untuk alokasi belanja infrastruktur di sektor kesehatan (Puskesmas dan Posyandu), serta Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI; f. Program Pengelolaan Pendidikan yang dialokasikan pada belanja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Peningkatan sarana dan Prasarana pendidikan.	-

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) untuk mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan Pembiayaan Utang Daerah dan TKD dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	Bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembangunan sektor pendidikan memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan Transfer Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik, serta penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan. Dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2026 dialokasikan pada: a. Program pengelolaan pendidikan; b. Program pengembangan kurikulum; c. Program pendidik dan tenaga kependidikan; d. Program pengendalian perizinan pendidikan; e. Program pengembangan bahasa dan sastra.	-

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Intervensi	Aktual	Ideal	Deviasi
Belum ada data.			

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	KUA	Total Belanja	Persen KUA	Batasan	Catatan
Belum ada data.					

PDRD

Jenis	KUA	Total Pendapatan	Nilai Minimal KUA	Persen KUA	Batasan	Catatan
Belum ada data.						